

ANRI TUJUAN STUDI BANDING PUSJARAH TNI



Tim Pusat Sejarah TNI saat berkunjung ke bagian restorasi arsip

Jakarta, ARSIP - 2 Juli 2014, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Mustari Irawan didampingi oleh Direktur Preservasi, Imam Gunarto menerima kunjungan kerja Kepala Pusat Sejarah Tentara Nasional Indonesia (TNI), Brigjen Zaedun terkait dengan peningkatan kemampuan dan wawasan tentang kearsipan. Dalam sambutannya, Mustari menyatakan fungsi ANRI ada dua yaitu penyimpanan dan pembinaan. Fungsi penyimpanan mulai dari akuisisi, pengelolaan, preservasi sampai pada penyajian arsip. Sedangkan fungsi



pembinaan dilakukan kepada instansi pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Negara (BUMD), serta perguruan tinggi negeri agar pengelolaan arsip berlangsung dengan baik.

Kapusjarah TNI beserta staf didampingi Kepala ANRI meninjau langsung ke Bagian yang menjadi core business ANRI antara lain ke Bagian Restorasi Arsip, Bagian Penyimpanan Arsip, dan Bagian Alih Media Baru Arsip. Tak luput dari kunjungan Kapusjarah TNI dan rombongan pun menyambangi Ruang Baca Arsip dan Diorama Sejarah Perjuangan Bangsa. (Rick)

ANRI RAIH PREDIKAT KEPATUHAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK

Jakarta, ARSIP - Ombudsman Republik Indonesia (RI) menyerahkan piagam Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Mustari Irawan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (18/7). Piagam diserahkan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI Djoko Suyanto didampingi Ketua Ombudsman RI, Danang Girindrawardana. Keberhasilan ini diraih setelah Ombudsman melakukan survei kepatuhan Standar Pelayanan Publik sesuai ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di lingkungan ANRI beberapa waktu lalu.

Dalam sambutannya mengatakan bahwa, acara ini adalah momentum penganjuran untuk memperkuat komitmen negara dalam mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Sejak tahun 2013, pihaknya telah melakukan observasi Kepatuhan Standar Pelayanan Publik di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Hasil yang didapat adalah tingkat kepatuhan terhadap pelayanan publik masih rendah," jelas Danang.

Lebih lanjut Danang mengungkapkan bahwa untuk tingkat kementerian kepatuhan hanya 22,2 persen. Selanjutnya untuk tingkat lembaga negara kepatuhannya hanya 27 persen. Sedangkan tingkat



Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) RI Djoko Suyanto menyerahkan piagam Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Mustari Irawan di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Jumat (18/7)

pemerintahan daerah, kepatuhan 10,5 persen. "Dengan keadaan seperti ini secara langsung mengakibatkan ketidakpastian hukum, ketidakakuratan pelayanan dan praktik-praktik pungli pada penyelenggaraan pelayanan publik dari pusat sampai daerah," tambah Danang.

Pada tahun 2014, lembaga negara pengawas pelayanan publik ini kemudian melakukan pendampingan dan pengarahan khusus ke sejumlah Unit Pelayanan Publik baik di tingkat kementerian/lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di tingkat pemerintah daerah. Hasilnya, 452 unit pelayanan publik pada 78 instansi negara masuk kategori patuh terhadap UU Nomor 25 Tahun 2009

tentang Pelayanan Publik. Rinciannya terdiri atas 25 Kementerian, 12 Lembaga, 178 SKPD Provinsi dan 237 SKPD Kota.

Sementara Menkopolhukam Djoko Suyanto dalam sambutannya sebagai *keynote speaker* mengatakan bahwa kualitas pelayanan publik merupakan salah satu ukuran keberhasilan pemerintahan baik di pusat dan di daerah, namun bukan hanya itu, karena sesungguhnya *public service* merupakan wajah negara dalam setiap kali berinteraksi dengan pemberi mandatnya, yaitu rakyat. "Pelayanan publik adalah alasan mengapa pemerintahan dan negara itu ada," jelas Djoko. (Rick)

BANGUN SINERGITAS, UI DAN ANRI TANDATANGANI NOTA KESEPAKATAN BERSAMA



Nota Kesepakatan Bersama ditandatangani oleh Rektor UI Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met dan Kepala ANRI Drs. Mustari Irawan, MPA di Gedung Pusat Administrasi Kampus UI Depok, Selasa 22 Juli 2014.

Depok, ARSIP - Guna membangun sinergitas di bidang kearsipan, Universitas Indonesia (UI) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menandatangani Nota Kesepakatan Bersama (NKB) tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat serta Pengembangan Kearsipan di Lingkungan Universitas Indonesia. Nota Kesepakatan Bersama ditandatangani Rektor UI Muhammad Anis dan Kepala ANRI Mustari Irawan, di Gedung Pusat Administrasi Kampus UI Depok (22/7).

Dalam Sambutannya Mustari mengungkapkan bahwa pentingnya

membangun sinergitas di antara kedua lembaga antara UI dengan ANRI sehingga akan memperoleh manfaat di masa mendatang untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Mustari menambahkan pentingnya membangun arsip perguruan tinggi (*university archives*). “Di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pada pasal 27 dikatakan bahwa setiap perguruan tinggi negeri diwajibkan membangun arsip perguruan tinggi, kalau di dalam konsep kearsipan ini yang disebut dengan *university archives*,” ungkapnya. Kepala ANRI juga mendukung dengan berdirinya

arsip perguruan tinggi di Universitas Indonesia.

Pada kesempatan yang sama, Muhammad Anis mengutarakan harapannya terhadap kerja sama tersebut. “Mudah-mudahan melalui kerja sama ini, UI bisa membangun dengan apa yang disampaikan (Kepala ANRI) dan UI harus menjadi trend setter untuk lebih cepat lagi prosesnya dalam mewujudkan pusat arsip UI untuk menjadi suatu *prototype* yang bisa diikuti oleh perguruan tinggi lainnya,” jelasnya. (sa)

ARSIP KRIS BIANTORO, KINI TERSIMPAN DI ANRI



Penyerahan arsip Kris Biantoro oleh pihak keluarga kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang diwakili Direktur Akuisisi Kandar. (16/8)

Jakarta, Arsip - Bertempat di kediaman Kris Biantoro, Cibubur Jakarta Timur dilaksanakan penyerahan arsip Kris Biantoro. Arsip tersebut diserahkan pihak keluarga kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang diwakili oleh Kandar selaku Direktur Akuisisi Arsip. Acara penyerahan arsip dilaksanakan di sela-sela acara mengenang setahun berpulangnya Kris Biantoro (16/8). Arsip yang diserahkan antara lain arsip foto, video, dan tekstual mengenai penghargaan-penghargaan yang telah diterima Kris Biantoro, aktivitas Kris Biantoro, dan lagu-lagu yang pernah dinyanyikan oleh Kris Biantoro.

Setelah acara penyerahan arsip, ANRI atas nama negara memberikan piagam penghargaan kepada pihak



Suasana acara penyerahan arsip Kris Biantoro

keluarga besar Kris Biantoro dalam rangka Pelestarian dan Penyelamatan Arsip yang Bernilai Guna Pertanggungjawaban Nasional bagi Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. Penyerahan

penghargaan diberikan Kandar kepada pihak keluarga Kris Biantoro.

Christopher Soebiantoro atau lebih dikenal di masyarakat Kris Biantoro adalah seniman multi talenta yang pernah menggeluti dunia pembawa acara, pemain film, pencipta lagu dan penyanyi. Kecintaan

Kris di dunia seni juga dibarengi dengan kecintaannya terhadap tanah air dan bangsa. Kris pernah menjadi relawan dalam pembebasan Irian Barat atau Operasi Trikora. Pelantun lagu "Mungkinkah" ini menghembuskan nafas terakhir pada 13 Agustus 2013. (sa)

KEPALA ANRI BERI ANUGERAH DELAPAN ARSIPARIS TELADAN TINGKAT NASIONAL TAHUN 2014

Jakarta, Arsip - Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Mustari Irawan, telah menganugerahkan arsiparis teladan tingkat nasional (17/8) kepada delapan terbaik peserta pemilihan arsiparis teladan tahun 2014 di Ruang Serba Guna Noerhadi Magetsari, gedung C, lantai 2 ANRI, jalan Ampera Raya nomor 7, Jakarta Selatan. Dalam kesempatan ini ada empat terbaik arsiparis tingkat ahli dan empat arsiparis tingkat terampil yang dianugerahkan sebagai arsiparis teladan tingkat nasional tahun 2014. Sebelumnya, sebanyak 46 peserta yang terdiri dari 19 orang arsiparis tingkat ahli dan 27 orang arsiparis tingkat terampil telah mengikuti berbagai tahapan tes yang terdiri dari ujian tertulis, wawancara dan presentasi kinerja. Para peserta berasal dari perwakilan provinsi dan instansi pusat.

Berikut adalah para pemenang arsiparis teladan tingkat nasional tahun 2014:

Arsiparis tingkat ahli:

Juara I : Dodi Setiawan (Kementerian Luar Negeri)

Juara II : Lastur Wahyudi (Pemerintah Prov. Jawa Tengah)

Juara III : Kris Hapsari (ANRI)

Harapan : Emi Ruliani (BPPT)

Arsiparis Tingkat Terampil:

Juara I : Fistria Agustina (Kementerian pendidikan dan Kebudayaan)

Juara II : Rita Umami (Pemerintah Prov. Jawa Tengah)

Juara III : Nurul Muhammad (Kementerian ESDM)

Harapan : Edar Santoso (Pemerintah DIY)



Foto bersama para peserta pemilihan arsiparis Teladan tahun 2014 dengan pimpinan ANRI (17/8)

Dalam sambutannya usai memberikan penganugerahan kepada para pemenang, Mustari menyampaikan bahwa arsiparis memiliki fungsi dan peranan yang sangat strategis dan eksistensinya pun secara resmi diakui dan diatur dalam undang-undang. "Misalnya arsiparis yang bertugas di Kementerian Luar Negeri, memiliki salah tugas dalam mengelola arsip perjanjian internasional. Keautentikan arsip tersebut pun harus terjaga dan di sini arsiparis mengambil peranan. Selain itu bagi arsiparis di tingkat daerah juga memiliki peranan dalam menyelamatkan memori kolektif daerah," jelas Mustari. Menutup sambutannya, Mustari pun berharap bahwa para arsiparis teladan ini dapat dijadikan contoh baik dari sisi etika, sikap maupun perilaku bagi para profesional di komunitas kearsipan.

Kegiatan pemilihan arsiparis teladan tingkat nasional tahun 2014 ini merupakan salah satu wujud peran serta ANRI dalam memberikan pembinaan terhadap sumber daya manusia (SDM) di bidang kearsipan yang diharapkan dapat terus

meningkatkan kualitas SDM kearsipan khususnya arsiparis yang kompeten, handal, berdedikasi dan berkinerja baik. Selain itu, kegiatan pemilihan arsiparis teladan pun menjadi salah satu ajang untuk memberikan apresiasi kepada arsiparis atas pengabdian dan jasanya terhadap bidang profesi kearsipan. Dengan demikian para arsiparis teladan ini dapat dijadikan contoh keteladanannya untuk meningkatkan pengelolaan arsip.

Selama mengikuti rangkaian kegiatan acara yang berlangsung mulai 16 s.d 18 Agustus 2014, keseluruhan peserta turut didampingi para pejabat pembina kearsipan yang memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan dalam pembinaan serta pengadaan bahan dan barang untuk menunjang kegiatan kearsipan.

Rangkaian kegiatan pemilihan arsiparis teladan tingkat nasional tahun 2014 diakhiri dengan diikutinya acara silaturahmi para teladan nasional dengan Presiden Republik Indonesia di J.I. Expo kemayoran pada 18 Agustus 2014. (TK)

KETUA AAI LANTIK DAN KUKUHKAN PENGURUS IAA 2014-2017



Ketua Umum Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI), DR. Andi Kasman saat melantik Pengurus Ikatan Arsiparis ANRI (IAA) periode 2014-2017 di RSB Noerhadi Magetsari, Gedung C Lantai 2, ANRI (18/8)

Jakarta, Arsip - Senin (18/8), Pengurus Ikatan Arsiparis ANRI (IAA) periode 2014-2017 secara resmi dilantik dan dikukuhkan oleh Ketua Umum Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI), Andi Kasman di Ruang Serba Guna Noerhadi Magetsari, Gedung C Lantai 2, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Acara ini dilaksanakan bertepatan dengan Musyawarah Nasional (Munas) ke-5 AAI Tahun 2014 yang diikuti oleh kalangan komunitas kearsipan Indonesia dari pihak pemerintah, badan usaha milik negara, pemerintah daerah, dan swasta.

Acara juga dihadiri para peserta kegiatan Arsiparis Teladan 2014 yang diselenggarakan ANRI. Pelantikan dan pengukuhan ini secara resmi memantapkan kedudukan pengurus IAA yang telah dipilih melalui proses

pemilihan Ketua IAA pada Maret 2014. Sebagai organisasi profesi kearsipan di level instansi, IAA diharapkan mampu menunjukan eksistensi melalui program-program yang berkesinambungan dan bermanfaat bagi arsiparis dalam kehidupan berorganisasi, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun susunan Pengurus IAA Periode 2014-2017 antara lain:

Ketua : Bambang P. Widodo

Wakil Ketua : Dharwis W.U. Yacob

Sekretaris : Aria Maulana

Sekretaris I : Widhi Setyo Putro

Sekretaris II : Sri Wahyuni

Bendahara Umum : Wiwi Diana Sari

Wakil Bendahara : Okta Handi S.

Bidang Edukasi & Pengembangan Profesi

1. Krihanta
2. Rudi Andri Syahputra

Bidang Penelitian & Publikasi Profesi

3. Nadia Fauziah Dwiandari
4. Adhie Gesit Pambudi

Bidang Kerjasama & Pengembangan Usaha

1. Nurarta Situmorang
2. Satimin

Bidang Advokasi & Penegakkan Kode Etik

1. Sutarwinarmo
2. Tuti Sriwidayanti

(AGP).

HADAPI ASEAN ECONOMIC COMMUNITY, ANRI SIAPKAN ARSIPARIS PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS TINGGI



Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan Dr. Andi Kasman M, S.E., M.M. memberikan sambutan pada acara Sertifikasi Arsiparis Tingkat Terampil Bidang Kompetensi Pengelolaan Arsip Dinamis Angkatan Pertama Tahun 2014. (20-21/8)

Jakarta, Arsip - Guna menghadapi *Asean Economic Community* (AEC) tahun 2015, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) mempersiapkan arsiparis profesional dan berintegritas tinggi. Hal itu disampaikan Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan Andi Kasman pada acara Sertifikasi Arsiparis Tingkat Terampil Bidang Kompetensi Pengelolaan Arsip Dinamis Angkatan Pertama Tahun 2014.

“Sudah sepatutnya ANRI ikut mempersiapkan diri pada acara internasional tersebut, salah satunya mempersiapkan arsiparis profesional dan berintegritas tinggi, sehingga tahun 2014 ditargetkan akan mensertifikasi arsiparis sebanyak 450 orang baik arsiparis tingkat terampil maupun tingkat ahli” ujarnya. Lebih lanjut Andi menambahkan bahwa



Peserta acara Sertifikasi Arsiparis Tingkat Terampil Bidang Kompetensi Pengelolaan Arsip Dinamis Angkatan Pertama Tahun 2014.

sertifikasi bertujuan untuk memberikan pengakuan formal kepada sumber daya manusia kearsipan oleh ANRI sebagai pengakuan terhadap kompetensi dalam bidang kearsipan.

Ujian Sertifikasi Arsiparis Tingkat Terampil Bidang Kompetensi Pengelolaan Arsip Dinamis

dilaksanakan pada 20-21 Agustus 2014 di Kantor ANRI Jalan Ampera Raya Nomor 7 Cilandak Timur Jakarta Selatan. Peserta ujian sertifikasi diikuti arsiparis tingkat terampil pada kementerian/lembaga pemerintah pusat berjumlah kurang lebih 75 orang arsiparis yang berasal dari 19 instansi.

Penyelenggaraan sertifikasi arsiparis merupakan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2012, ayat (1) bahwa ANRI menyelenggarakan akreditasi dan sertifikasi arsiparis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada ayat (3) Sertifikasi Arsiparis dilaksanakan terhadap arsiparis yang mengikuti uji kompetensi berdasarkan peraturan pemerintah. (sa)

PRAMONO ANUNG BUKA PAMERAN ARSIP BOEDI OETOMO

Jakarta, ARSIP - Wakil Ketua dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Pramono Anung Wibowo membuka secara resmi Pameran Arsip Boedi Oetomo yang diselenggarakan di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) jalan Gajah Mada nomor 111 Jakarta Barat (21/8). Pameran yang diselenggarakan atas kerja sama ANRI, *National Archives of the Netherlands* (NAN), Erasmus Huis dan majalah *Historia* ini dilaksanakan mulai 21 s.d 30 Agustus 2014. Dalam kesempatan ini turut hadir pula Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia Wouter Plomp, Kepala ANRI Mustari Irawan, MPA., Director of NAN Prof. Dr. K.J.P.F.M. Charles Juergens dan Pemimpin Redaksi Majalah *Historia* Bonnie Triyana.

Dalam sambutan pembukaannya Pramono menyampaikan bahwa melalui pameran arsip tentang Boedi Oetomo kita dapat banyak belajar, Boedi Oetomo telah menginspirasi pergerakan dan perjuangan bangsa kita dan tentunya *the founding fathers*. "Melalui pameran ini semoga kita diingatkan kembali dengan kiprah Boedi Oetomo sehingga mampu membangkitkan rasa percaya diri bangsa kita, mampu mempertahankan nasionalisme dan siap menghadapi globalisasi," jelas Pramono.

Selain itu, Mustari pun mengungkapkan bahwa melalui pameran arsip ini kita dapat melihat dan mengingat kembali keberadaan Boedi Oetomo yang sangat penting bagi Indonesia yang memberikan pengaruh kepada para pemuda yang menghendaki perubahan fundamental agar tidak bergantung kepada orang lain. Peran dan kiprahnya mampu memupuk rasa nasionalisme. "Ada



Wakil Ketua dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Dr. Pramono Anung Wibowo pada 21 Agustus 2014 membuka secara resmi Pameran Arsip Boedi Oetomo yang diselenggarakan di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) jalan Gajah Mada nomor 111 Jakarta Barat



Pramono Anung saat meninjau Pameran Arsip Boedi Oetomo

beberapa arsip di antaranya tentang Boedi Oetomo, tokoh-tokoh pendiri dan tempat kongres yang dipamerkan di sini," jelas Mustari.

Dalam kesempatan ini, Juergens menyampaikan bahwa pameran arsip Boedi Oetomo tidaklah disiapkan dalam waktu yang singkat. Sebelumnya telah dilaksanakan beberapa kegiatan

penelusuran arsip baik di Indonesia dan Belanda yang berkaitan dengan Boedi Oetomo. "Di sini pun melibatkan arsiparis asal Indonesia yang mencari arsip terkait di Belanda," tambah Juergens. Juergens pun berharap bahwa ke depannya kerja sama yang dilakukan ini tidak hanya sebatas pameran tetapi juga berkaitan dengan penelitian, preservasi, digitalisasi dan akses arsipnya. Senada halnya dengan yang disampaikan Juergens, Wouter Plomp pun menyampaikan bahwa kerja sama yang telah terjalin ini dapat diteruskan tidak hanya sebatas pada pameran. "Apalagi Belanda dan Indonesia memiliki keterkaitan dengan masa lalu," tambah Plomp. (TK)

ANRI LAPORKAN PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN APBN TA 2013 KE KOMISI II DPR RI



Rapat Dengar Pendapat Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan komisi II DPR RI

Jakarta, ARSIP - Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memberikan tanggapan yang positif terkait dengan Laporan pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013 keempat mitra kerjanya di pemerintahan yaitu, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja bersama keempat kementerian dan lembaga Negara tersebut di Senayan, Jakarta, Rabu (20/8) malam.

“Walaupun hingga Agustus 2014 penyerapannya baru mencapai 70 persen yang digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana. Masih ada waktu bagi keempat mitra kerja untuk menyerap anggaran hingga seratus persen. Hal tersebut semata agar program-program yang telah disusun dapat berjalan sesuai rencana dan sesuai harapan,”sebut Achmad Muqowam, anggota Komisi II DPR RI.

Sementara itu untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2015 sesuai dengan nota keuangan yang dianggarkan oleh mitra kerjanya, di mana hampir semua melakukan peningkatan anggaran yang cukup signifikan.

ANRI mengalami kenaikan sebesar 55 Miliar atau sekitar 47 persen dari pagu kementerian/Lembaga tahun 2014 yang telah direvisi. Untuk hal tersebut politisi dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menilai hal tersebut sangatlah wajar. Mengingat mitra kerja komisi II tersebut dapat dikatakan ruh atau jiwa dari pemerintah secara keseluruhan. “Kenaikan atau peningkatan anggaran yang diminta itu tidak seberapa atau masih tergolong hal yang wajar,” ungkapnya.

Muqowam juga mengingatkan agar ANRI memberikan manfaat kepada lini pemerintahan, jangan hanya menjadi tempat penyimpanan arsip atau pusat sejarah. (Rick)

ANRI RAIH PREDIKAT B AKIP 2014, MOTOR PENGGERAK PEMBANGUNAN DI SEKTOR PUBLIK



Penyerahan Penghargaan dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat (AKIP) oleh Wakil Presiden Boediono kepada Kepala ANRI Mustari Irawan. Pada tahun 2014 ANRI peroleh Prediket B

Jakarta, ARSIP - Para Pimpinan Kementerian, Lembaga Negara dan Pemerintah Daerah menghadiri penyerahan Penghargaan dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pusat (AKIP) oleh Wakil Presiden Boediono di Istana Wakil Presiden, Jalan Kebon Sirih, Jakarta (24/9). Predikat B diperoleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang diterima langsung oleh Kepala ANRI, Mustari Irawan.

Dalam sambutan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB), Azwar Abubakar mengatakan, nilai akuntabilitas kementerian/lembaga selama 2014 naik 1,04 dibanding tahun

sebelumnya. Sedangkan akuntabilitas kinerja pemerintah provinsi selama 2014 mencapai 59,04 meningkat dari tahun 2013 yang hanya mencapai 56,92.

"Ini berarti instansi pemerintah menjadi lebih akuntabel dalam penggunaan anggaran, meskipun belum memuaskan," ujarnya

Wakil Presiden RI, Boediono dalam sambutannya mengatakan sektor publik dapat menjadi motor penggerak, serta fasilitator pembangunan. Namun sektor publik dapat pula menjadi penghambat, unsur yang menggerogoti pembangunan.

"Ini yang perlu kita sadari. Kunci sekali peran dari sektor publik ini.

Dan hak tersebut akhirnya kembali ke reformasi masing-masing," ujar Boediono.

Selain penilaian oleh Kementerian PAN dan RB, upaya-upaya lain yang dilakukan untuk mengukur kinerja instansi pemerintah antara lain berdasarkan laporan keuangan oleh Kementerian Keuangan serta survei mengenai pelayanan instansi pemerintah terhadap berbagai lapisan masyarakat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Dalam lima tahun terakhir, Boediono menyebut upaya pemerintah untuk melakukan perbaikan kinerja instansi pemerintah terus dilakukan namun, Wapres mengakui banyak PR yang belum terselesaikan. (Fir)

PERERAT SIMPUL JARINGAN KEARSIPAN NASIONAL, ANRI BERIKAN PENGHARGAAN



Kepala ANRI saat memberikan sambutan pada acara Rakornas SIKN-JIKN (24/9)

Jakarta, ARSIP - Batavia Ballroom, Hotel de Rivier menjadi saksi bagi dua belas simpul jaringan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) yang memperoleh penghargaan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Mustari Irawan pada (24/9). Dalam kesempatan ini turut mendampingi Deputi Bidang Informasi dan Pengembangan Sistem Kearsipan ANRI Dini Saraswati serta Deputy Divisi *Business Service* PT. Telkom. Tbk, Yoyok Setyono.

Kedua belas simpul jaringan yang memperoleh penghargaan ini antara lain ANRI, PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk, Unit Kearsipan Institut Pertanian Bogor, Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Provinsi Banten,

BAPD Aceh, BPAD Kota Denpasar, BPAD KAB. Lamongan, BPAD Kab. Banyuasin, Kantor Arsip Kab. Bantul, Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Sukabumi, KPPDE Pemerintah Kota Cimahi dan Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bogor.

Dalam sambutannya Mustari mengharapkan semua instansi pemerintah tingkat pusat maupun daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta Perguruan Tinggi Negeri dapat mempublikasikan kinerja yang dapat dilihat oleh masyarakat baik arsip statis maupun arsip dinamis melalui SIKN dan JIKN. Hal ini menjadi salah satu wujud transparansi kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintahan

yang juga merupakan bagian dari konsep reformasi birokrasi dan inti terwujudnya *good governance*.

Pada kesempatan yang sama, Mustari pun mengharapkan program kearsipan melalui SIKN dan JIKN ini menjadi salah satu jawaban terhadap harapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang kinerja Kementerian Kabinet Indonesia Jilid I dan jilid II yang terdokumentasikan dengan baik dan dapat diakses masyarakat sebagai pertanggungjawaban nasional. Dengan demikian masyarakat dari berbagai pelosok tanah air dapat dengan mudah mengakses informasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di setiap instansi tanpa membutuhkan waktu yang lama. (fir)

SERTIFIKAT UNESCO TARI SAMAN DAN NOKEN, DISERAHKAN KE ARSIP NASIONAL RI

Jakarta, ARSIP - Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud) bidang Kebudayaan, Wiendu Nuryanti menyerahkan sertifikat pengakuan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pendidikan, Sains, dan Kebudayaan (UNESCO) untuk Tari Saman sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia kepada Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Mustari Irawan. Penyerahan sertifikat dilaksanakan di Anjungan Aceh, Taman Mini Indonesia Indah (25/9). Penyerahan sertifikat dilakukan secara simbolis dengan estafet dari perwakilan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selanjutnya diserahkan ke ANRI. Wiendu juga menyerahkan duplikasi sertifikat Tari Saman kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah didampingi oleh Kepala Daerah Gayo lues.

Wiendu mengutarakan makna penting acara penyerahan sertifikat. "Penyerahan tersebut (sertifikat) memiliki makna dan arti yang sangat dalam, paling tidak di tiga hal penting yaitu bahwa kita semua khususnya dalam hal ini adalah pemerintah daerah istimewa Nangroe Aceh Darussalam yang paling dekat mempunyai hubungan lahir dan batin dengan Tari Saman tersebut mempunyai tanggung jawab, pertama adalah untuk perlindungan, yang kedua adalah untuk pengembangannya serta untuk pemanfaatannya" ujarnya.

Lebih lanjut Wiendu mengimbau kepada pemerintah provinsi Aceh untuk mensosialisasikan sertifikat pengakuan dunia terhadap Tari Saman



Wamendikbud bidang Kebudayaan, Wiendu Nuryanti menyerahkan sertifikat pengakuan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pendidikan, Sains, dan Kebudayaan (UNESCO) untuk Tari Saman sebagai Warisan Budaya Takbenda Indonesia kepada Kepala ANRI Mustari Irawan. (25/9)

ke kabupaten, kecamatan sampai ke tingkat desa untuk dapat mendekatkan rasa kepemilikan masyarakat Aceh terhadap Tari Saman.

Tari Saman merupakan warisan budaya masyarakat Gayo yang dapat dilacak sampai abad ke-13 yang kemudian dikembangkan Syekh Saman, dan berisi tentang pesan-pesan moral. Tari Saman dilakukan oleh anak laki-laki dan orang-orang muda, selalu dilakukan dengan jumlah ganjil, duduk di atas tumit atau berlutut pada suatu baris yang rapat. Para pemain memakai kostum border hitam dengan motif gayo beraneka warna, yang melambangkan alam dan nilai-nilai luhur.

Selain penyerahan sertifikat pengakuan UNESCO terhadap Tari Saman, diserahkan pula Sertifikat pengakuan UNESCO terhadap Noken sebagai Warisan Budaya Takbenda

Indonesia. Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari serat kulit kayu. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti sayuran, umbi-umbian dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar.

Turut hadir pada acara penyerahan sertifikat, Ketua Harian Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Arief Rachman, Perwakilan UNESCO, dan komunitas masyarakat Aceh. Selain acara penyerahan sertifikat, di lokasi yang sama diselenggarakan Pameran Perjalanan Warisan Budaya Dunia Indonesia. (sa)

ARSIP HILANG, ASET MELAYANG!



Konferensi Pers Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Arsip Aset pada Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Kupang, 7 – 8 Oktober 2014

Kupang, Arsip - “Pengelolaan arsip yang baik, akan mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mempertahankan dan menyelamatkan aset daerah, dengan demikian tidak ada lagi aset pemerintah di daerah yang hilang karena tidak dapat memberikan cukup bukti berupa arsip yang dimilikinya, kalau arsip hilang, maka aset kita bisa ikut hilang,” ujar Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan, Andi Kasman dalam pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Arsip Aset pada Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/ Kota, Kupang, 7 – 8 Oktober 2014.

“Bagi suatu daerah, aset memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi dan tentu saja harus didukung dengan tersedianya arsip aset. Oleh karena itu keberadaan arsip aset selain memiliki kekuatan hukum, ia juga memiliki nilai guna kepastian bagi kekayaan daerah, maka keberadaan arsip aset

harus dikelola secara baik dan benar,” lanjutnya.

Acara yang diprakarsai Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) bekerja sama dengan Badan Arsip Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ini bermaksud memberikan pemahaman akan arti pentingnya arsip aset dalam penyelenggaraan pemerintah khususnya di lingkungan pemerintah daerah, sehingga dengan pemahaman tersebut akan mengantarkan pada kesadaran untuk mengelola arsip aset tersebut dengan baik.

Selain diikuti Lembaga Kearsipan Daerah (LKD) Provinsi/Kabupaten/ Kota di wilayah Timur yaitu Papua, Papua Barat, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur, Bimtek yang dibuka secara resmi oleh Gubernur Provinsi NTT, diwakili oleh Asisten Daerah II Sekretariat Daerah Provinsi NTT, Andreas Jehalu tersebut dihadiri

pula oleh perwakilan dari dinas yang membidangi pengelolaan kekayaan dan aset daerah di wilayah Timur serta beberapa LKD wilayah barat dan tengah sebagai peninjau, dengan jumlah 150 peserta. Dalam Sambutannya, Andreas menyambut baik kegiatan Bimtek tersebut dan mengharapkan kegiatan Bimtek pengelolaan arsip aset dapat membawa manfaat yakni meningkatkan kemampuan dan keterampilan arsiparis di daerah dalam mengelola arsip aset.

Hadir sebagai pembicara, Kepala Biro Umum Badan Pertanahan Nasional, H.M. Najib Taufieq, Kepala Biro Aset Daerah Provinsi NTT, Obaldus Toda, Direktur Kearsipan Daerah, Widarno, Kepala Subdirektorat Kearsipan Daerah I, M. Abdul Haris serta arsiparis ANRI. Acara ditutup secara resmi oleh Sekretaris Utama ANRI, Gina Masudah Husni. (lie)

GALANG MASUKAN, ANRI GELAR EKSPOS DRAFT NSPK PEDOMAN RETENSI ARSIP SEKTOR KESRA



Kepala ANRI saat membuka acara Ekspose Draft NSPK Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesra

Jakarta, ARSIP - Guna memperoleh masukan dari terkait dalam penyusunan Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat (Kesra), Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan (Pusjibang Siskar) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menggelar Ekspose Draft Norma Standar Prosedur Kriteria (NSPK) tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesra. Acara diselenggarakan (9/10) di Ruang Noerhadi ANRI Ampera Raya Jakarta. Acara diikuti perwakilan enam urusan lembaga teknis terkait yakni urusan pariwisata dan ekonomi kreatif, agama, kependudukan dan keluarga berencana, kearsipan, masalah sosial dan masalah kesehatan.

Dalam laporan Ketua Panitia yang juga Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan Dinamis Rini Agustiani menyampaikan tujuan diselenggarakannya acara



Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan ANRI Rudi Anton saat memberikan pemaparan mengenai pedoman retensi arsip

ekspos. “Tujuan kegiatan ini untuk membangun pemahaman dan kesadaran pencipta arsip dalam pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien, melalui penyusunan dan penetapan kebijakan penetapan jadwal retensi arsip”, ujarnya. Lebih lanjut Rini menambahkan bahwa

menentukan jadwal retensi arsip ditentukan berdasarkan pedoman retensi arsip yang disusun oleh kepala ANRI yang disusun oleh lembaga teknis terkait sebagaimana diamanatkan pasal 40 ayat 4 dan pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Acara ekspose dibuka langsung Kepala ANRI Mustari Irawan. Saat menyampaikan arahan, Mustari Irawan menyampaikan pentingnya pedoman retensi arsip. “Pedoman retensi arsip ini sangat penting sekali bagi kementerian/lembaga, karena menjadi dasar penyusunan jadwal retensi arsip” ungkapnya. Mustari mengutarakan harapannya atas diselenggarakannya acara ekspos. “Kami berharap dari tujuan ekspos draft NSPK Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesra ini yang pertama adalah berusaha memperoleh masukan yang dapat dijadikan dasar dan juga merumuskan kesamaan konsepsi tentang retensi arsip”, imbuhnya.

Selain sektor Kes-ra, Pusjibang Siskar juga telah menyelenggarakan ekspose pem-bahasan draft Pedoman Retensi Arsip Sektor Perekonomian Tahap III (7/10) dan Ekspose Pembahasan Draft Pedoman Retensi Arsip Sektor Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Tahap II (8/10). (sa)

GUBERNUR SUMUT: PENYELENGGARAAN KEARSIPAN PERLU DITUNJANG PEMAHAMAN KOMPREHENSIF

Medan, Arsip - Aurora Ballroom, Hotel Grand Antares jalan Sisingamaraja nomor 328 menjadi saksi bisu dihelatnya Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan di Provinsi Sumatera Utara (9/10). Sosialisasi yang dihadiri lebih dari 130 orang peserta ini terdiri dari pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kepala lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota, Badan Usaha Milik Daerah, Universitas dan Arsiparis di lingkungan provinsi Sumatera Utara.

"Penyelenggaraan dan pengelolaan arsip merupakan pekerjaan yang perlu ditunjang dengan pemahaman yang komprehensif, tenaga yang profesional dan membutuhkan dukungan teknologi serta anggaran," ujar Gubernur Sumatera Utara yang sambutannya disampaikan Asisten III Bidang Kesejahteraan Sosial Sekda Provinsi Sumatera Utara, H. Zulkarnain.

"Arsip tak bisa lagi dianggap sepele, apa yang kita kerjakan, bagaimana *performance* dan akuntabilitas akan dinilai dan ini harus dimulai serta dijalankan dari SKPD kita masing-masing untuk menjalankan kewajiban perundang-undangan yang ada seperti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor



Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan di Provinsi Sumatera Utara (9/10)

25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 43 tentang Kearsipan terkait dengan pelayanan pemerintah terhadap publik," jelas Sekretaris Utama ANRI Gina Masudah Husni dalam sambutannya.

Kepala Biro Hukum dan Kepegawaian ANRI Zita Asih dalam paparannya menyatakan bahwa pembinaan kearsipan jangan hanya diartikan hanya dari pusat, lembaga kearsipan daerah dalam hal ini BPAD Sumatera Utara melakukan juga pembinaan terhadap SKPD dan kantor arsip kabupaten/kota, sinergi inilah yang diinginkan.

Sedangkan Direktur Kearsipan Daerah ANRI Widarno dalam materinya pada sesi kedua mengatakan bahwa Provinsi Sumatera Utara menempati rangking kedua terbawah dalam hal provinsi yang belum memiliki kantor kearsipan daerah kabupaten/kota. Dari 33 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara, baru 11 kabupaten/kota yang memiliki kantor. Makna lembaga kearsipan adalah sebagai motor pemerintah daerah untuk menertibkan arsip sebagai pendorong transparansi dan menyokong akuntabilitas. (Rick)

SBY SERAHKAN DOKUMEN NEGARA SEBAGAI PERTANGGUNGJAWABAN KE ANRI

Bogor, ARSIP - Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Mustari Irawan secara simbolis menerima arsip 10 tahun pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Sudi Silalahi (17/10) di Ruang Garuda Istana Kepresidenan, Bogor. Pada kesempatan ini dilaksanakan pula penandatanganan berita acara serah terima arsip statis oleh Mustari Irawan dan Sudi Silalahi yang turut disaksikan Presiden SBY, Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, pimpinan lembaga negara, pimpinan lembaga pemerintah serta para undangan. Arsip yang diserahkan berjumlah 500 bundel.

Usai pelaksanaan serah terima arsip, SBY meninjau display arsip yang telah diserahkan. Dalam kesempatan ini SBY mengajak Kepala ANRI beserta jajarannya untuk bersama-sama meninjau sambil memberikan beberapa wejangan yang amat penting. "Memimpin selama dua periode harus dipertanggungjawabkan kepada negara, hakikatnya kepada rakyat sehingga suatu saat jika akan melakukan penulisan sejarah, pembuatan buku-buku, riset, disertasi, tesis atau yang lainnya dokumen yang dibutuhkan itu ada di negara, dalam hal sesuai dengan Undang-Undang ANRI adalah lembaga resmi yang diberikan amanah dan kepercayaan untuk mengelola, menyimpan dan mendayagunakan arsip ini," jelas SBY.

SBY juga menyampaikan bahwa jangan sampai ada lagi polemik atau diskursus di kalangan masyarakat luas bahwa ada dokumen negara yang tidak jelas keberadaannya, tidak boleh terjadi lagi. Mengakhiri wejangannya, SBY berharap kepada ANRI agar dapat menggunakan arsip sebaik-baiknya.

Selain itu SBY pun menyampaikan pesan yang tidak kalah pentingnya



SBY saat menjelaskan arsip yang akan diserahkan ke ANRI kepada Kepala ANRI beserta jajarannya di Ruang Garuda, Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat (17/10)



Penandatanganan berita acara serah terima arsip 10 Tahun Pemerintahan SBY oleh Kepala ANRI Mustari Irawan dan Menteri Sekretariat Negara Sudi Silalahi

bahwa dalam mengawali suksesi peralihan kepemimpinan, beliau mengawali dengan tradisi yang baik dengan menyerahkan dokumen negara kepada ANRI. "Dan ini dapat dikuiti bukan hanya tingkat Presiden tetapi juga tingkat lembaga negara, lembaga pemerintahan, kementerian, bahkan gubernur/kepala daerah suatu saat dapat menyerahkan arsip penting yang memiliki nilai sejarah yang

tinggi diserahkan kepada ANRI/ lembaga kearsipan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang," tambahnya.

Arsip 10 tahun pemerintahan Presiden SBY yang diserahkan di antaranya melingkupi regulasi seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, instruksi presiden, ratifikasi, perangkat hukum dan perjanjian internasional, dokumen kepresidenan seperti surat resmi dari dan kepada presiden, nota kesepahaman, himpunan naskah pidato, kumpulan artikel dan buku karya presiden, foto dan video.

Dalam usaha pengumpulan arsip tersebut yang dilaksanakan selama empat bulan dibentuk sebuah tim berdasarkan Keputusan Mensesneg Nomor 95 Tahun 2014 tanggal 30 Juli 2014. Tim diketuai oleh Sekretaris Militer Presiden.(TK)

TINGKATKAN DAYA SAING, BP BATAM JALIN KERJA SAMA DENGAN ANRI



Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) tandatangani Kesepakatan Bersama di Bidang Kearsipan. Acara penandatanganan dilaksanakan oleh Mustari Irawan Selaku Kepala ANRI dan Mustofa Widjaja selaku Kepala BP Batam di Ruang Soemartini ANRI, Cilandak, Jakarta Selatan

Jakarta, ARSIP - Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) tandatangani Kesepakatan Bersama di Bidang Kearsipan (21/10). Acara penandatanganan dilaksanakan Kepala ANRI Mustari Irawan dan Kepala BP Batam Mustofa Widjaja di Ruang Soemartini ANRI, Cilandak, Jakarta Selatan. Penandatanganan Kesepakatan Bersama tersebut merupakan perpanjangan Kesepakatan Bersama ANRI dengan BP Batam Nomor: HK.02/20/2010 dan Nomor 17/PERJ-KABP/1020 tentang Pembinaan Bidang Kearsipan di Lingkungan BP Batam tanggal 1 November 2010.

Dalam sambutannya Mus-

tofa mengutarakan hal yang melandasi pelaksanaan kegiatan penandatanganan kesepakatan bersama. "Arsip merupakan salah satu sumber informasi terekam yang sangat penting dalam menunjang proses kegiatan administrasi, memudahkan pencarian data apabila diperlukan dalam waktu yang singkat, tepat, dan akurat", ungkapnya.

Mustari juga menyambut positif acara penandatanganan Kesepakatan Bersama tersebut. "Hal ini merupakan langkah positif pentingnya arsip dalam penyelenggaraan negara menuju *good governance* dan *clean government*" Ujarnya. Mustari juga mengapresiasi BP Batam atas perhatian dan komitmennya dalam penyelenggaraan

kearsipan dalam rangka meningkatkan daya saing bagi BP Batam.

Adapun program-program kerja sama yang akan dilakukan di antaranya, pertama pembinaan sistem dan pengelolaan arsip dinamis di BP Batam sesuai standar kearsipan. Kedua, penyelamatan dan pelestarian arsip statis BP Batam. Ketiga, pengembangan unit kearsipan. Keempat, pengembangan sarana dan prasarana kearsipan (pusat arsip). Kelima, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang kearsipan di lingkungan BP Batam serta kegiatan lain yang berkaitan dengan bidang kearsipan. (sa)

LANTIK ESELON I, KEPALA ANRI: HARUS KREATIF, INOVATIF DAN KAYA IDE



Penandatanganan Berita Acara Pelantikan Deputy Bidang Konservasi (Dekon) Arsip, M. Taufik (22/10) di Ruang Serba Guna Noerhadi Magetsari

Jakarta, ARSIP - Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Mustari Irawan melantik Deputy Bidang Konservasi (Dekon) Arsip, M. Taufik (22/10) di Ruang Serba Guna Noerhadi Magetsari. Dekon terpilih merupakan buah dari serangkaian proses *open bidding* sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Dalam sambutannya, Mustari menyampaikan beberapa pesan khusus di antaranya Dekon yang telah dilantik harus kreatif, inovatif, kaya ide/

gagasan, dan membuat program dan kegiatan nyata yang berguna atau langsung dirasakan manfaatnya oleh publik.

“Adapula beberapa tugas yang harus segera dilaksanakan, di antaranya akuisi arsip kepresidenan yang belum lama diserahkan presiden SBY, pembangunan arsip kepresidenan (*Presidential Archive*) di Gedung Arsip Gajah Mada, pengajuan arsip Konferensi Asia Afrika dan Gerakan Non Blok untuk mendapatkan pengakuan sebagai *Memory of the*

World, persiapan Indonesia sebagai tuan rumah *International Council of Archive* dan serangkaian kegiatan lainnya,” jelas Mustari.

Acara pelantikan ini dihadiri pula oleh Komisioner Komite Aparatur Sipil Negara, Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB), beberapa pejabat eselon I yang tergabung dalam paguyuban Kementerian PAN dan RB serta pejabat eselon I, II, dan III di lingkungan ANRI. (TK)

MARI BERJUANG BERSAMA JADIKAN ARSIP KAA SEBAGAI WARISAN DUNIA!

Jakarta, ARSIP - Sebagai salah satu upaya menyebarluaskan nilai-nilai Dasasila Bandung melalui penominasian arsip Konferensi Asia Afrika (KAA) menjadi warisan dunia atau *Memory of The World* (MoW), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menggelar *Focus Group Discussion* (FGD) di Ruang Serba Guna Noerhadi Magetsari, ANRI (27/10).

Acara FGD yang dibuka Kepala ANRI, Mustari Irawan menghadirkan *keynote speech* Ketua Komite Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU), Prof. Arief Rachman. Dalam paparannya, Arief menyampaikan bahwa keuntungan mendapatkan MoW bukanlah sesuatu hal yang bersifat material. Jangan sampai Indonesia menjadi bangsa yang dikendalikan pola pikir untung keuangan.

“Pengajuan arsip KAA sebagai MoW karena kita ingin memiliki norma, kehidupan yang bermartabat dan nilai lebih sebagai sebuah bangsa yang merdeka. Penominasian arsip KAA sebagai MoW banyak yang sangat relevan dengan kehidupan sekarang. Kita harus berjuang bersama-sama dengan tekun untuk menjadikan arsip KAA sebagai MoW,” papar Arief.

Pernyataan Prof. Arief tersebut senada halnya dengan pernyataan Kepala ANRI Mustari Irawan saat membuka acara. Mustari menyampaikan bahwa para penggagas penominasian arsip KAA sebagai MoW berupaya dengan keras untuk selalu menyediakan berbagai dokumentasi yang berkaitan dengan KAA baik naskah, foto, dan film. “Marilah kita secara bersama-sama mewujudkan impian agar seluruh dokumentasi KAA yang ada dapat segera diimplementasikan ke forum internasional dan menempati posisi yang baik serta terhormat dalam MoW,” jelas Mustari.



Pemutaran arsip film Konferensi Asia Afrika di sela-sela acara FGD Mengembangkan Nilai-Nilai Dasasila Bandung melalui penominasian arsip Konferensi Asia Afrika (KAA) menjadi warisan dunia atau *Memory of The World* (MoW) (27/10)

Tak lama berselang setelahnya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 1993 s.d 1998, Prof. Wardiman Djojonegoro menyampaikan paparan singkat tentang proses pengajuan dan perkembangan penominasian arsip KAA sebagai MoW. Wardiman juga menyampaikan beberapa usulan tentang program percepatan penominasian arsip KAA sebagai MoW.

Berbagai masukan dan saran dijamin dalam dua sesi diskusi FGD ini. Sesi pertama diskusi mengupas tema Nilai-Nilai KAA. Pada kesempatan ini hadir tiga orang pemateri yaitu Jackson Leung, saksi sejarah pelaksanaan KAA, sejarawan Mukhlis PaEni dan Ketua MoW Indonesia Prof. Bambang Subiyanto.

Sesi kedua membahas tema Progres Pengajuan Arsip KAA sebagai MoW dengan pembicara Deputy Bidang Pengembangan Bahan Perpustakaan dan Jasa Informasi, Perpustakaan Nasional Welmin Sunyi Ariningsih, Kepala Subdirektorat Sosial Budaya OINB Kementerian Luar Negeri,

Gulvan Alvero dan Kepala Operasional PT Jakarta Prima Digital Lavesh M. Santani.

Selain itu, seperti yang disampaikan Prof. Arief dan Mustari bahwa kita harus berjuang bersama menjadikan arsip KAA sebagai MoW, masyarakat umum pun dapat terlibat aktif. Mereka secara serempak dapat memberikan dukungannya dalam proses penominasian arsip KAA sebagai MoW dengan cara memberikan “like” pada film dokumenter KAA melalui [link http://youtube.be/-3dG7wB9Wcm](http://youtube.be/-3dG7wB9Wcm).

FGD yang bertajuk mengembangkan nilai-nilai Dasasila Bandung melalui penominasian arsip KAA menjadi MoW dihadiri peserta sebanyak 100 orang yang berasal dari KNIU, Komite MoW Indonesia, arsiparis, guru, dosen, komunitas sejarah, lembaga kearsipan daerah, Perguruan Tinggi, peneliti dan jurnalis. (TK)

ANRI TERIMA ARSIP BERNILAI GUNA SEJARAH DARI 13 PENCIPTA ARSIP

Jakarta, ARSIP - Bertepatan dengan peringatan ke-86 Hari Sumpah Pemuda, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) akan menerima arsip bernilai guna sejarah (statis) pada 28 Oktober 2014 yang berasal dari 13 pencipta arsip.

Acara penyerahan arsip dilaksanakan di Hotel Amaroosa, jalan Pangeran Antasari nomor 9A-B, Jakarta Selatan pukul 08.30. Arsip yang diserahkan akan diterima oleh Kepala ANRI, Mustari Irawan.

Dalam sambutannya, Mustari menyampaikan bahwa arsip adalah aset yang paling berharga, merupakan warisan nasional dari generasi ke generasi yang perlu dipelihara dan dilestarikan. Tingkat peradaban suatu bangsa dapat dilihat dari pemeliharaan dan pelestarian terhadap arsipnya.

“Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah menyerahkan arsip 10 tahun masa pemerintahannya di Istana Bogor (17/10). Beliau amat paham amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan bahwa semua lembaga negara, BUMN, Partai Politik,

dan Organisasi Kemasyarakatan, dan tokoh nasional berkewajiban untuk menyerahkan arsip statisnya kepada ANRI,” jelas Mustari.

Adapun ketiga belas pencipta arsip yang menyerahkan arsip statisnya kepada ANRI dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No	Pencipta Arsip	Jenis Arsip yang Diserahkan di antaranya	Jumlah
1	Kementerian Luar Negeri	Penetapan batas zona ekonomi eksklusif dengan negara tetangga	10 boks
2	Kementerian Kesehatan	Berkas mengenai pengunduran diri Dr. Endang Rahayu, berkas mengenai kasus susu formula	1 boks
3	Sekretariat Kabinet	Surat Keputusan Presiden, Instruksi Presiden Tahun 2003-2007, Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Gol IV c ke atas dan lain-lain	437 boks
4	ANRI	Rancangan Undang-Undang tentang Kearsipan, pelurusan Supersemar dalam rangka 36 tahun supersemar, penggunaan logo ANRI, wawancara sejarah lisan kembalinya GAM ke pangkuan ibu pertiwi dan lain-lain	15 boks
5	Lembaga Sandi Negara	Berkas personil mantan kepala lembaga sandi negara, berkas mengenai susunan organisasi jawatan sandi. dll	4 boks
6	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	Arsip Foto mengenai semburan lumpur dari eksplorasi Banjar Panji 1, Lapindo Brantas inc, Kabupaten Sidoarjo, Arsip Peta mengenai wilayah kerja penanganan dan penanggulangan lumpur Lapindo, Arsip Video mengenai kunjungan kerja Presiden, Wapres, Menteri PU ke lumpur Sidoarjo	3 boks
7	PT. Taspen	Berkas pembentukan dan perubahan organisasi, anggaran perusahaan, hak kepesertaan, laporan tahunan, pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan komisaris dan direksi. dll	14 boks
8	PT. Balai Pustaka	Berkas perjanjian kerja sama antara penerbit dengan penulis antara lain penulis AT. Mahmud	1 boks
9	Palang Merah Indonesia	Berkas Restoring Family Links (pencarian orang hilang dimasa peperangan)	23 boks
10	Pengurus Besar Nahdlatul Ulama	Berkas hasil muktamar NU ke 28, hasil pleno PBNU Tahun 1994-1999, dll	15 boks
11	PP Muhammadiyah	Berkas pelimpahan wewenang penyelenggaraan SMU Muhammadiyah 1 ke Dikdasmen Pimpinan Muhammadiyah Jakarta Pusat, saran masukan Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional kepada Muhammadiyah dalam Era Reformasi Damai dan Sukses Global di segala bidang, dll	11 boks
12	Tokoh Seni Pewayangan, Pangdam Guntur	Kongres Pedalangan Nasional, Kongres Nasional Pewayangan Indonesia, Kidung Pemuji yang dipersembahkan dalam rangka Kongres Bahasa Jawa, dll.	10 boks
13	Gubernur kedua DKI Jakarta, Henk Ngantung	Surat penghargaan dari Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atas jasa-jasa dalam pemikiran, perumusan, penciptaan Pataka Korra I	2 boks

Tabel mengenai tiga belas pencipta arsip yang menyerahkan arsip statisnya ke ANRI



Kepala ANRI saat memberikan sambutan pada acara Rapat Koordinasi Penyelamatan Arsip Negara dalam Mendukung Pembangunan Bangsa dan Peningkatan Ilmu Pengetahuan (28/10)

Serah terima arsip sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 53 dan Pasal 77. Selain itu, kegiatan tersebut pun senada dengan pesan SBY di Istana Bogor silam bahwa dalam mengawali suksesi kepemimpinan, diawali dengan tradisi yang baik dengan menyerahkan dokumen negara/ arsip kepada ANRI dan hal ini dapat dikuiti bukan hanya tingkat Presiden tetapi juga tingkat lembaga negara, lembaga pemerintahan, kementerian, bahkan gubernur/kepala daerah suatu saat dapat menyerahkan arsip penting yang memiliki nilai sejarah yang tinggi

diserahkan kepada ANRI/lembaga kearsipan.

Sebelum pelaksanaan serah terima arsip, tim akuisisi ANRI terlebih dahulu melaksanakan prosedur akuisisi arsip sesuai dengan Peraturan Kepala ANRI Nomor 31 Tahun 2011 tentang Tata Cara Akuisisi Arsip Statis.

Dalam kesempatan yang sama digelar Rapat Koordinasi (rakor) Penyelamatan Arsip Negara dalam Mendukung Pembangunan Bangsa dan Peningkatan Ilmu Pengetahuan. Dalam rakor dilaksanakan dua diskusi panel. Pembicara yang hadir di

antaranya Mohammad Iskandar, Puji Hastuti dan Prof. Dr. Emil Salim

Kegiatan rakor dihadiri 100 orang peserta yang terdiri dari perwakilan dari berbagai instansi pemerintah dan tokoh-tokoh organisasi kemasyarakatan. Rakor berakhir pada pukul 16.00 WIB dan ditutup Deputi Bidang Konservasi Arsip ANRI, M. Taufik. (TK)

YUDDY CHRISNANDI: PENYERAHAN ARSIP BUKAN HIMBAUAN TAPI PERINTAH



Kunjungan Kerja Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi di lingkungan ANRI (29/10)

Jakarta, ARSIP - Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Mustari Irawan beserta jajaran pejabat eselon I dan II di lingkungan ANRI menerima kunjungan kerja (kunker) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB), Yuddy Chrisnandi (29/10) yang didampingi Sekretaris Kementerian PAN dan RB, Dwi Wahyu Atmaji.

Kegiatan kunker diawali dengan pemaparan tugas pokok dan fungsi ANRI oleh Mustari. Selanjutnya, menteri kelahiran Bandung, 29 Mei 1968 ini menyampaikan beberapa hal yang dapat meningkatkan kualitas kinerja ANRI, khususnya dalam hal penyerahan arsip statis dari kementerian/instansi pemerintah tingkat pusat kepada ANRI.

Yuddy menyampaikan bahwa arsip nasional harus memiliki semua kategori yang termasuk arsip statis. Kita juga bisa menarik arsip kategori statis dari semua kementerian,



Yuddy Chrisnandi meninjau Ruang Baca sebagai tempat Layanan Arsip Statis

sehingga semuanya ada di sini."Mulai penataan di tingkat pusat dulu. Ini dapat dibuat target pada 34 departemen, lalu Lembaga Pemerintah Nonkementerian. Penyerahan arsip bukan lagi himbauan tetapi ini sebuah perintah. Menpan hanya sebagai fungsi koordinasi, tetapi ANRI bertanggung jawab langsung kepada Presiden, nanti dapat dibuatkan konsep surat dan aspek legal lainnya

yang dapat dikuatkan oleh Presiden tentang penyerahan arsip tersebut. Menpan bantu secara kelembagaan," tegas Yuddy.

Dalam kunjungannya, menteri yang akrab disapa Kang Yuddy ini juga memberikan apresiasi atas pelayanan publik yang telah dilakukan ANRI. "Saran saya, tingkatkan pelayanan yang sudah ada, agar lebih baik lagi," ujar Yuddy. Tak lupa, di tengah majunya perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi Kang Yuddy juga berpesan agar laman kelembagaan milik ANRI informasinya harus selalu terbaru dan mudah diakses.

Sebelum mengakhiri kunjungannya, Yuddy menyempatkan melaksanakan peninjauan lapangan ke Ruang Baca sebagai tempat layanan arsip statis dan Diorama Sejarah Perjalanan Bangsa. (TK)

IAA DAN HUMAS ANRI GELAR WORKSHOP PENULISAN ARTIKEL POPULER DAN MENGENAL LEBIH DEKAT MAJALAH ARSIP

Jakarta, ARSIP - Selasa (4/11), Ikatan Arsiparis ANRI (IAA) bekerja sama dengan Biro Perencanaan ANRI menyelenggarakan Workshop Penulisan Artikel Populer Bidang Kearsipan di Media Massa dan Mengenal Lebih Dekat Majalah ARSIP sebagai Media Kearsipan Nasional. Acara yang dilangsungkan di Gedung C ANRI, Jakarta ini dibuka Kepala ANRI, Mustari Irawan.

Pembukaan acara ini dihadiri oleh Sekretaris Utama ANRI, Gina Masudah Husni DAB jajaran Pejabat Eselon II ANRI, Pengurus IAA, narasumber dan para peserta. Workshop ini diikuti oleh 120 orang yang terdiri dari arsiparis anggota IAA dan arsiparis non-anggota dari berbagai lembaga lain seperti Kementerian Pertanian, Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Sekretariat Negara, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kantor Arsip dan Perpustakaan Prov. Bangka Belitung, Universitas Airlangga, dan lain-lain.

Dalam sambutannya, Mustari menyampaikan tentang pentingnya kemampuan arsiparis dalam menulis dengan mengkaitkan bidang kearsipan dengan isu-isu aktual yang terjadi di



Redaktur Majalah SWA, Teguh Poeradisatra saat memberikan pemaparan materi Penulisan Artikel Populer Bidang Kearsipan di Media Massa

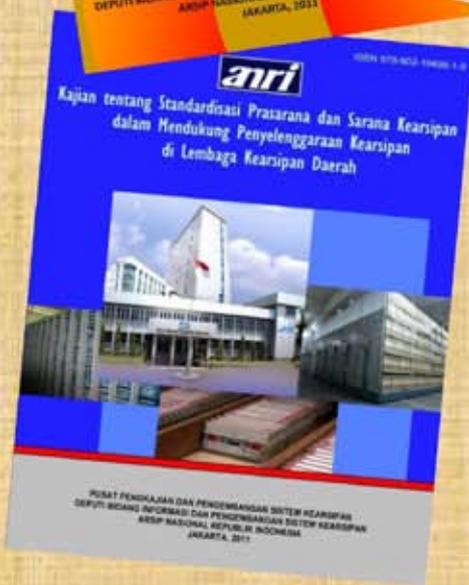
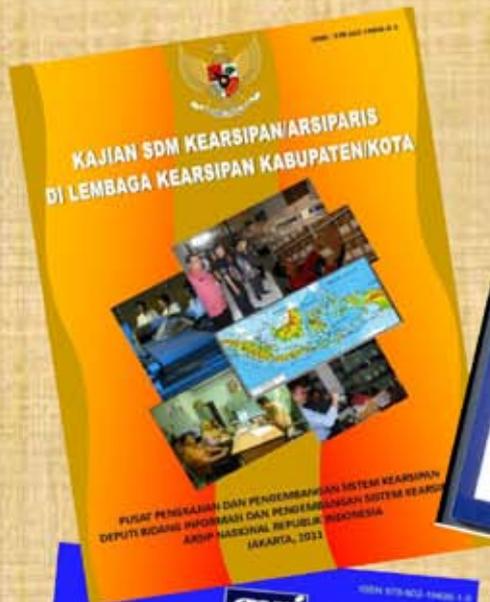
masyarakat. Arsiparis yang merupakan pakar di bidang kearsipan diharapkan tulisannya dapat dimuat di media massa nasional seperti harian Kompas khususnya untuk tulisan-tulisan yang berkaitan dengan kearsipan.

Acara diawali dengan mengajak peserta workshop untuk mengenal lebih dekat peran dan fungsi Majalah ARSIP sebagai Media Kearsipan Nasional dengan pemaparan dari Azmi Ketua Dewan Redaksi Majalah ARSIP terbitan HUMAS ANRI. Acara dilanjutkan dengan kegiatan utama yaitu workshop yang dipandu oleh Teguh Poeradisatra dari

majalah SWA sekaligus Pakar Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia. Dalam pemaparan materi, Teguh Poeradisatra memberikan tips dan triknya dalam penulisan artikel populer bidang kearsipan di media massa.

Antusiasme peserta terlihat sangat tinggi dengan penuhnya ruangan workshop dari awal hingga akhir acara. Para peserta merasakan dampak yang besar dalam peningkatan pengetahuan mereka dalam penulisan artikel populer di bidang kearsipan. (AGP).

Analisis Kebijakan dan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Kearsipan Nasional bersumber dari Hasil Riset dan Kajian yang Ilmiah, Unggul dan Profesional yang dilakukan oleh Arsiparis dan Peneliti



Untuk mempertinggi mutu penyelenggaraan kearsipan nasional, ANRI melalui Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan secara rutin melakukan penelitian dan pengembangan sistem kearsipan dalam bentuk riset/ kajian dan penyusunan NSPK di bidang sistem kearsipan dinamis dan sistem kearsipan statis, serta menerbitkan Jurnal Kearsipan

NSPK Kearsipan Nasional diharapkan dapat membantu:

- **Pencipta arsip** (Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, Ormas/ Orpol, BUMN/ BUMD, dan PTN) dalam melakukan pengelolaan arsip dinamis guna menjamin ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah
- **Lembaga Kearsipan** dalam melakukan pengelolaan arsip statis guna menjamin keselamatan arsip sebagai pertanggungjawaban nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai kaidah-kaidah kearsipan dan peraturan perundang-undangan

Informasi lebih lanjut :

PUSAT PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN
DEPUTI BIDANG INFORMASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM KEARSIPAN
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Jl. Ampera Raya No. 7, Jakarta Selatan (12560)

Telp. (021) 7805851 Psw. 722 Fax. (021) 7810282 E-Mail: pusjibangsiskar@yahoo.co.id



KUNJUNGI...
GEDUNG ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DI JALAN GAJAH MADA NO. 111, JAKARTA BARAT

- PAMERAN KELEMBAGAAN ARSIP NASIONAL RI
- PAMERAN ARSIP
- PEMUTARAN ARSIP FILM SEJARAH PERJUANGAN INDONESIA
- PAMERAN BENDA-BENDA BERSEJARAH

Jadwal Berkunjung:
Pameran Arsip, Kelembagaan, & Pemutaran Arsip Film
Dibuka Senin-Jum'at, 9.00-15.00 WIB



UNDUH MAJALAH **ARSIP** DALAM FORMAT DIGITAL



Cara unduh majalah ARSIP dalam format digital:

1. Masuk ke *website* www.anri.go.id
2. Klik menu "Publikasi"
3. Kemudian pilih "Majalah ARSIP"
4. Unduh *file* "Majalah ARSIP"
5. Majalah ARSIP tersedia dalam *Portable Document Format (PDF)* dan dapat dibaca menggunakan *software* Adobe Acrobat